

**STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN
BERBASIS AKRUAL**

PERNYATAAN NO. 02

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

**KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN
DESEMBER 2008**

DAFTAR ISI

	Paragraf
PENDAHULUAN	1-4
Tujuan	1-2
Ruang Lingkup	3-4
MANFAAT INFORMASI REALISASI ANGGARAN	5-6
DEFINISI	7
STRUKTUR LAPORAN REALISASI ANGGARAN	8-9
PERIODE PELAPORAN	10
TEPAT WAKTU	11
ISI LAPORAN REALISASI ANGGARAN	12-15
INFORMASI YANG DISAJIKAN DALAM LAPORAN REALISASI ANGGARAN ATAU DALAM CATATAN ATAS	
LAPORAN KEUANGAN	16-17
AKUNTANSI ANGGARAN	18-20
AKUNTANSI PENDAPATAN-LRA	21-30
AKUNTANSI BELANJA	31-46
AKUNTANSI SURPLUS/DEFISIT	47-49
AKUNTANSI PEMBIAYAAN	50
AKUNTANSI PENERIMAAN PEMBIAYAAN	51-54
AKUNTANSI PENGELUARAN PEMBIAYAAN	55-57
AKUNTANSI PEMBIAYAAN NETO	58-59
AKUNTANSI SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA/SIKPA)	60-62
TRANSAKSI DALAM MATA UANG ASING	63-66
TRANSAKSI PENDAPATAN-LRA, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN BERBENTUK BARANG DAN JASA	67
TANGGAL EFEKTIF	68

Lampiran:

Lampiran A : Contoh Format Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Pusat

Lampiran B : Contoh Format Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Provinsi

Lampiran C : Contoh Format Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten/Kota

STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL PERNYATAAN NO. 02

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Paragraf-paragraf yang ditulis dengan huruf tebal dan miring adalah paragraf standar, yang harus dibaca dalam konteks paragraf-paragraf penjelasan yang ditulis dengan huruf biasa dan Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan

PENDAHULUAN

Tujuan

1. Tujuan standar Laporan Realisasi Anggaran adalah menetapkan dasar-dasar penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk pemerintah dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

2. Tujuan pelaporan realisasi anggaran adalah memberikan informasi tentang realisasi dan anggaran entitas pelaporan secara tersanding. Penyandingan antara anggaran dan realisasinya menunjukkan tingkat ketercapaian target-target yang telah disepakati antara legislatif dan eksekutif sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Ruang Lingkup

3. ***Pernyataan Standar ini diterapkan dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran yang disusun dan disajikan dengan menggunakan anggaran berbasis kas.***

4. ***Pernyataan Standar ini berlaku untuk setiap entitas pelaporan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, yang memperoleh anggaran berdasarkan APBN/APBD, tidak termasuk perusahaan negara/daerah.***

MANFAAT INFORMASI REALISASI ANGGARAN

5. Laporan Realisasi Anggaran menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya. Informasi tersebut berguna bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber-sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan ketaatan entitas pelaporan terhadap anggaran dengan:

1 (a) menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan
2 sumber daya ekonomi;

3 (b) menyediakan informasi mengenai realisasi anggaran secara
4 menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja pemerintah
5 dalam hal efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran.

6 6. Laporan Realisasi Anggaran menyediakan informasi yang
7 berguna dalam memprediksi sumber daya ekonomi yang akan diterima
8 untuk mendanai kegiatan pemerintah pusat dan daerah dalam periode
9 mendatang dengan cara menyajikan laporan secara komparatif.
10 Laporan Realisasi Anggaran dapat menyediakan informasi kepada para
11 pengguna laporan tentang indikasi perolehan dan penggunaan sumber
12 daya ekonomi:

13 (a) telah dilaksanakan secara efisien, efektif, dan hemat;

14 (b) telah dilaksanakan sesuai dengan anggarannya (APBN/APBD); dan

15 (c) telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

16 **DEFINISI**

17 7. Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam
18 *Pernyataan Standar dengan pengertian:*

19 ***Anggaran*** merupakan pedoman tindakan yang akan dilaksanakan
20 pemerintah meliputi rencana pendapatan, belanja, transfer, dan
21 pembiayaan yang diukur dalam satuan rupiah, yang disusun menurut
22 klasifikasi tertentu secara sistematis untuk satu periode.

23 ***Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)*** adalah rencana
24 keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan
25 Perwakilan Rakyat Daerah.

26 ***Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)*** adalah rencana
27 keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan
28 Perwakilan Rakyat.

29 ***Apropriasi*** merupakan anggaran yang disetujui DPR/DPRD yang
30 merupakan mandat yang diberikan kepada
31 Presiden/gubernur/bupati/walikota untuk melakukan pengeluaran-
32 pengeluaran sesuai tujuan yang ditetapkan.

33 ***Azas Bruto*** adalah suatu prinsip yang tidak memperkenankan pencatatan
34 secara neto penerimaan setelah dikurangi pengeluaran pada suatu unit
35 organisasi atau tidak memperkenankan pencatatan pengeluaran setelah
36 dilakukan kompensasi antara penerimaan dan pengeluaran.

37 ***Basis Kas*** adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan
38 peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

39 ***Belanja*** adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum
40 Negara/Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode
41 tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh

1 **pembayarannya kembali oleh pemerintah.**

2 **Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung**
3 **kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat**
4 **dipenuhi dalam satu tahun anggaran.**

5 **Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau**
6 **lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-**
7 **undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa**
8 **laporan keuangan.**

9 **Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan**
10 **oleh Bendaharawan Umum Daerah untuk menampung seluruh**
11 **penerimaan dan pengeluaran Pemerintah Daerah.**

12 **Kas Negara adalah tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan**
13 **oleh Menteri Keuangan selaku Bendaharawan Umum Negara untuk**
14 **menampung seluruh penerimaan dan pengeluaran Pemerintah Pusat.**

15 **Kebijakan akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-**
16 **konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh**
17 **suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan**
18 **keuangan.**

19 **Kurs adalah rasio pertukaran dua mata uang.**

20 **Otorisasi Kredit Anggaran (allotment) adalah dokumen pelaksanaan**
21 **anggaran yang menunjukkan bagian dari apropriasi yang disediakan**
22 **bagi instansi dan digunakan untuk memperoleh uang dari Rekening Kas**
23 **Umum Negara/Daerah guna membiayai pengeluaran-pengeluaran**
24 **selama periode otorisasi tersebut.**

25 **Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum**
26 **Negara/Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode**
27 **tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan**
28 **tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.**

29 **Pembiayaan (financing) adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar**
30 **kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada**
31 **tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran**
32 **berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama**
33 **dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus**
34 **anggaran.**

35 **Perusahaan daerah adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian**
36 **modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah.**

37 **Perusahaan negara adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian**
38 **modalnya dimiliki oleh Pemerintah Pusat.**

39 **Rekening Kas Umum Negara adalah rekening tempat penyimpanan uang**
40 **negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum**

1 Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar
2 seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.

3 Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang
4 daerah yang ditentukan oleh gubernur/bupati/walikota untuk
5 menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh
6 pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

7 Saldo Anggaran Lebih adalah gunggung saldo yang berasal dari
8 akumulasi SiLPA/SiKPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun
9 berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan.

10 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) adalah selisih
11 lebih/kurang antara realisasi pendapatan-LRA dan belanja, serta
12 penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBN/APBD selama
13 satu periode pelaporan.

14 Surplus/defisit-LRA adalah selisih lebih/kurang antara pendapatan-LRA
15 dan belanja selama satu periode pelaporan.

16 Transfer adalah penerimaan/pengeluaran uang dari suatu entitas
17 pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana
18 perimbangan dan dana bagi hasil.

19 STRUKTUR LAPORAN REALISASI ANGGARAN

20 8. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi realisasi
21 pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, dan pembiayaan,
22 yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu
23 periode.

24 9. Dalam Laporan Realisasi Anggaran harus diidentifikasi
25 secara jelas, dan diulang pada setiap halaman laporan, jika dianggap
26 perlu, informasi berikut:

- 27 (a) nama entitas pelaporan atau sarana identifikasi lainnya;
- 28 (b) cakupan entitas pelaporan;
- 29 (c) periode yang dicakup;
- 30 (d) mata uang pelaporan; dan
- 31 (e) satuan angka yang digunakan.

32 PERIODE PELAPORAN

33 10. Laporan Realisasi Anggaran disajikan sekurang-kurangnya
34 sekali dalam setahun. Dalam situasi tertentu tanggal laporan suatu entitas
35 berubah dan Laporan Realisasi Anggaran tahunan disajikan dengan suatu
36 periode yang lebih panjang atau pendek dari satu tahun, entitas
37 mengungkapkan informasi sebagai berikut:

- 38 (a) alasan penggunaan periode pelaporan tidak satu tahun;

1 **(b) fakta bahwa jumlah-jumlah komparatif dalam Laporan Realisasi**
2 **Anggaran dan catatan-catatan terkait tidak dapat**
3 **diperbandingkan.**

4 **TEPAT WAKTU**

5 11. Manfaat suatu Laporan Realisasi Anggaran berkurang jika
6 laporan tersebut tidak tersedia tepat pada waktunya. Faktor-faktor seperti
7 kompleksitas operasi pemerintah tidak dapat dijadikan pembenaran atas
8 ketidakmampuan entitas pelaporan untuk menyajikan laporan keuangan
9 tepat waktu. Suatu entitas pelaporan menyajikan Laporan Realisasi
10 Anggaran selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah berakhirnya
11 tahun anggaran.

12 **ISI LAPORAN REALISASI ANGGARAN**

13 12. Laporan Realisasi Anggaran disajikan sedemikian rupa
14 sehingga menonjolkan berbagai unsur pendapatan, belanja, transfer,
15 surplus/defisit, dan pembiayaan yang diperlukan untuk penyajian yang
16 wajar. Laporan Realisasi Anggaran menyandingkan realisasi pendapatan-
17 LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, dan pembiayaan dengan
18 anggarannya. Laporan Realisasi Anggaran dijelaskan lebih lanjut dalam
19 Catatan atas Laporan Keuangan yang memuat hal-hal yang
20 mempengaruhi pelaksanaan anggaran seperti kebijakan fiskal dan
21 moneter, sebab-sebab terjadinya perbedaan yang material antara
22 anggaran dan realisasinya, serta daftar-daftar yang merinci lebih lanjut
23 angka-angka yang dianggap perlu untuk dijelaskan.

24 **13. Laporan Realisasi Anggaran sekurang-kurangnya**
25 **mencakup pos-pos sebagai berikut:**

26 **(a) Pendapatan-LRA**

27 **(b) Belanja**

28 **(c) Transfer**

29 **(d) Surplus/defisit-LRA**

30 **(e) Penerimaan pembiayaan**

31 **(f) Pengeluaran pembiayaan**

32 **(g) Pembiayaan neto; dan**

33 **(h) Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA / SiKPA)**

34 **14. Pos, judul, dan sub jumlah lainnya disajikan dalam Laporan**
35 **Realisasi Anggaran apabila diwajibkan oleh Pernyataan Standar**
36 **Akuntansi Pemerintahan ini, atau apabila penyajian tersebut diperlukan**
37 **untuk menyajikan Laporan Realisasi Anggaran secara wajar.**

38 15. Contoh format Laporan Realisasi Anggaran disajikan dalam
39 lampiran PSAP 02.A, 02.B, dan 02.C standar ini. Lampiran merupakan
40 ilustrasi dan bukan merupakan bagian dari standar. Tujuan lampiran ini

1 adalah mengilustrasikan penerapan standar untuk membantu dalam
2 klarifikasi artinya.

3 **INFORMASI YANG DISAJIKAN DALAM LAPORAN** 4 **REALISASI ANGGARAN ATAU DALAM CATATAN** 5 **ATAS LAPORAN KEUANGAN**

6 *16. Entitas pelaporan menyajikan klasifikasi pendapatan*
7 *menurut jenis pendapatan-LRA dalam Laporan Realisasi Anggaran, dan*
8 *rincian lebih lanjut jenis pendapatan disajikan pada Catatan atas Laporan*
9 *Keuangan.*

10 *17. Entitas pelaporan menyajikan klasifikasi belanja menurut*
11 *jenis belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran. Klasifikasi belanja*
12 *menurut organisasi disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran atau di*
13 *Catatan atas Laporan Keuangan. Klasifikasi belanja menurut fungsi*
14 *disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.*

15 **AKUNTANSI ANGGARAN**

16 18. Akuntansi anggaran merupakan teknik
17 pertanggungjawaban dan pengendalian manajemen yang digunakan
18 untuk membantu pengelolaan pendapatan, belanja, transfer, dan
19 pembiayaan.

20 19. Akuntansi anggaran diselenggarakan sesuai dengan struktur
21 anggaran yang terdiri dari anggaran pendapatan, belanja, dan
22 pembiayaan. Anggaran pendapatan meliputi estimasi pendapatan yang
23 dijabarkan menjadi alokasi estimasi pendapatan. Anggaran belanja
24 terdiri dari apropriasi yang dijabarkan menjadi otorisasi kredit anggaran
25 (*allotment*). Anggaran pembiayaan terdiri dari penerimaan pembiayaan
26 dan pengeluaran pembiayaan.

27 20. Akuntansi anggaran diselenggarakan pada saat anggaran
28 disahkan dan anggaran dialokasikan.

29 **AKUNTANSI PENDAPATAN-LRA**

30 *21. Pendapatan-LRA diakui pada saat diterima pada Rekening*
31 *Kas Umum Negara/Daerah.*

32 *22. Pendapatan-LRA diklasifikasikan menurut jenis pendapatan.*

33 *23. Transfer masuk adalah penerimaan uang dari entitas*
34 *pelaporan lain, misalnya penerimaan dana perimbangan dari pemerintah*
35 *pusat dan dana bagi hasil dari pemerintah provinsi.*

36 *24. Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas*
37 *bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat*
38 *jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).*

1 **25. Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LRA**
2 **bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak**
3 **dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka**
4 **asas bruto dapat dikecualikan.**

5 **26. Dalam hal badan layanan umum, pendapatan diakui**
6 **dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur**
7 **mengenai badan layanan umum.**

8 **27. Pengembalian yang sifatnya sistemik (normal) dan berulang**
9 **(recurring) atas penerimaan pendapatan-LRA pada periode penerimaan**
10 **maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang**
11 **pendapatan-LRA.**

12 **28. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang**
13 **(non-recurring) atas penerimaan pendapatan-LRA yang terjadi pada**
14 **periode penerimaan pendapatan-LRA dibukukan sebagai pengurang**
15 **pendapatan-LRA pada periode yang sama.**

16 **29. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang**
17 **(non-recurring) atas penerimaan pendapatan-LRA yang terjadi pada**
18 **periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang Saldo Anggaran**
19 **Lebih pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.**

20 **30. Akuntansi pendapatan-LRA disusun untuk memenuhi**
21 **kebutuhan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan dan untuk**
22 **keperluan pengendalian bagi manajemen pemerintah pusat dan**
23 **daerah.**

24 **AKUNTANSI BELANJA**

25 **31. Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari**
26 **Rekening Kas Umum Negara/Daerah.**

27 **32. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran**
28 **pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran**
29 **tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.**

30 **33. Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan**
31 **mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai**
32 **badan layanan umum.**

33 **34. Belanja diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis**
34 **belanja), organisasi, dan fungsi.**

35 **35. Klasifikasi ekonomi adalah pengelompokan belanja yang**
36 **didasarkan pada jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas.**
37 **Klasifikasi ekonomi untuk pemerintah pusat yaitu belanja pegawai,**
38 **belanja barang, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial,**
39 **dan belanja lain-lain. Klasifikasi ekonomi untuk pemerintah daerah**
40 **meliputi belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, bunga,**
41 **subsidi, hibah, bantuan sosial, dan belanja tak terduga.**

1 36. Belanja operasi adalah pengeluaran anggaran untuk
2 kegiatan sehari-hari pemerintah pusat/daerah yang memberi manfaat
3 jangka pendek. Belanja operasi antara lain meliputi belanja pegawai,
4 belanja barang, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial.

5 37. Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk
6 perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari
7 satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal
8 untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, dan aset tak
9 berwujud.

10 38. Belanja lain-lain/tak terduga adalah pengeluaran anggaran
11 untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang
12 seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan
13 pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka
14 penyelenggaraan kewenangan pemerintah pusat/daerah.

15 39. Contoh klasifikasi belanja menurut ekonomi (jenis belanja)
16 adalah sebagai berikut:

17 Belanja Operasi:

18 - Belanja Pegawai xxx

19 - Belanja Barang xxx

20 - Bunga xxx

21 - Subsidi xxx

22 - Hibah xxx

23 - Bantuan Sosial xxx

24 Belanja Modal

25 - Belanja Aset Tetap xxx

26 - Belanja Aset Lainnya xxx

27 Belanja Lain-lain/Tak Terduga xxx

28 Transfer xxx

29
30 **40. Transfer keluar adalah pengeluaran uang dari entitas**
31 **pelaporan ke entitas pelaporan lain seperti pengeluaran dana**
32 **perimbangan oleh pemerintah pusat dan dana bagi hasil oleh**
33 **pemerintah daerah.**

34 41. Klasifikasi menurut organisasi yaitu klasifikasi berdasarkan unit
35 organisasi pengguna anggaran. Klasifikasi belanja menurut organisasi di
36 lingkungan pemerintah pusat antara lain belanja per kementerian
37 negara/lembaga beserta unit organisasi di bawahnya. Klasifikasi belanja
38 menurut organisasi di pemerintah daerah antara lain belanja Sekretariat
39 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Sekretariat Daerah pemerintah
40 provinsi/kabupaten/kota, dinas pemerintah tingkat

1 provinsi/kabupaten/kota, dan lembaga teknis daerah
2 provinsi/kabupaten/kota.

3 42. Klasifikasi menurut fungsi adalah klasifikasi yang didasarkan
4 pada fungsi-fungsi utama pemerintah pusat/daerah dalam memberikan
5 pelayanan kepada masyarakat.

6 43. Contoh klasifikasi belanja menurut fungsi adalah sebagai
7 berikut:

8 Belanja :

- | | | |
|----|---------------------------------|-----|
| 9 | - Pelayanan Umum | xxx |
| 10 | - Pertahanan | xxx |
| 11 | - Ketertiban dan Keamanan | xxx |
| 12 | - Ekonomi | xxx |
| 13 | - Perlindungan Lingkungan Hidup | xxx |
| 14 | - Perumahan dan Permukiman | xxx |
| 15 | - Kesehatan | xxx |
| 16 | - Pariwisata dan Budaya | xxx |
| 17 | - Agama | xxx |
| 18 | - Pendidikan | xxx |
| 19 | - Perlindungan sosial | xxx |

20
21 **44. Realisasi anggaran belanja dilaporkan sesuai dengan**
22 **klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen anggaran.**

23 **45. Koreksi atas pengeluaran belanja (penerimaan kembali**
24 **belanja) yang terjadi pada periode pengeluaran belanja dibukukan**
25 **sebagai pengurang belanja pada periode yang sama. Apabila diterima**
26 **pada periode berikutnya, koreksi atas pengeluaran belanja dibukukan**
27 **dalam pendapatan-LRA dalam pos pendapatan lain-lain.**

28 46. Akuntansi belanja disusun selain untuk memenuhi kebutuhan
29 pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan, juga dapat
30 dikembangkan untuk keperluan pengendalian bagi manajemen dengan
31 cara yang memungkinkan pengukuran kegiatan belanja tersebut.

32 **AKUNTANSI SURPLUS/DEFISIT-LRA**

33 47. Surplus-LRA adalah selisih lebih antara pendapatan-LRA dan
34 belanja selama satu periode pelaporan.

35 48. Defisit-LRA adalah selisih kurang antara pendapatan-LRA
36 dan belanja selama satu periode pelaporan.

1 **49. Selisih antara pendapatan-LRA dan belanja selama satu**
2 **periode pelaporan dicatat dalam pos Surplus/Defisit-LRA.**

3 **AKUNTANSI PEMBIAYAAN**

4 50. Pembiayaan (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan
5 pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar
6 atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah
7 terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan
8 surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal
9 dari pinjaman, dan hasil divestasi. Sementara, pengeluaran pembiayaan
10 antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman,
11 pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh
12 pemerintah.

13 **AKUNTANSI PENERIMAAN PEMBIAYAAN**

14 51. Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan
15 Rekening Kas Umum Negara/Daerah antara lain berasal dari penerimaan
16 pinjaman, penjualan obligasi pemerintah, hasil privatisasi perusahaan
17 negara/daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada
18 pihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana
19 cadangan.

20 **52. Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada**
21 **Rekening Kas Umum Negara/Daerah.**

22 **53. Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan**
23 **berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto,**
24 **dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan**
25 **pengeluaran)**

26 54. Pencairan Dana Cadangan mengurangi Dana Cadangan
27 yang bersangkutan.

28 **AKUNTANSI PENGELUARAN PEMBIAYAAN**

29 55. Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran
30 Rekening Kas Umum Negara/Daerah antara lain pemberian pinjaman
31 kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah, pembayaran
32 kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan
33 pembentukan dana cadangan.

34 **56. Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari**
35 **Rekening Kas Umum Negara/Daerah.**

36 57. Pembentukan Dana Cadangan menambah Dana
37 Cadangan yang bersangkutan. Hasil-hasil yang diperoleh dari
38 pengelolaan Dana Cadangan di pemerintah daerah merupakan
39 penambah Dana Cadangan. Hasil tersebut dicatat sebagai
40 pendapatan-LRA dalam pos pendapatan asli daerah lainnya.

1 **AKUNTANSI PEMBIAYAAN NETO**

2 58. Pembiayaan neto adalah selisih antara penerimaan
3 pembiayaan setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan dalam periode
4 tahun anggaran tertentu.

5 **59. Selisih lebih/kurang antara penerimaan dan pengeluaran**
6 **pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos**
7 **Pembiayaan Neto.**

8 **AKUNTANSI SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN** 9 **ANGGARAN (SILPA/SIKPA)**

10 60. SiLPA/SiKPA adalah selisih lebih/kurang antara realisasi
11 penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan.

12 **61. Selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan-LRA dan**
13 **Belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu**
14 **periode pelaporan dicatat dalam pos SiLPA/SiKPA.**

15 62. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran pada akhir
16 periode pelaporan dipindahkan ke Laporan Perubahan Saldo Anggaran
17 Lebih.

18 **TRANSAKSI DALAM MATA UANG ASING**

19 **63. Transaksi dalam mata uang asing harus dibukukan dalam**
20 **mata uang rupiah.**

21 **64. Dalam hal tersedia dana dalam mata uang asing yang sama**
22 **dengan yang digunakan dalam transaksi, maka transaksi dalam mata**
23 **uang asing tersebut dicatat dengan menjabarkannya ke dalam mata**
24 **uang rupiah berdasarkan kurs tengah bank sentral pada tanggal**
25 **transaksi.**

26 **65. Dalam hal tidak tersedia dana dalam mata uang asing yang**
27 **digunakan dalam transaksi dan mata uang asing tersebut dibeli dengan**
28 **rupiah, maka transaksi dalam mata uang asing tersebut dicatat dalam**
29 **rupiah berdasarkan kurs transaksi, yaitu sebesar rupiah yang digunakan**
30 **untuk memperoleh valuta asing tersebut.**

31 **66. Dalam hal tidak tersedia dana dalam mata uang asing yang**
32 **digunakan untuk bertransaksi dan mata uang asing tersebut dibeli**
33 **dengan mata uang asing lainnya, maka:**

- 34 a. **Transaksi mata uang asing ke mata uang asing lainnya**
35 **dijabarkan dengan menggunakan kurs transaksi**
36 b. **Transaksi dalam mata uang asing lainnya tersebut dicatat**
37 **dalam rupiah berdasarkan kurs tengah bank sentral pada**
38 **tanggal transaksi.**

TRANSAKSI PENDAPATAN-LRA, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN BERBENTUK BARANG DAN JASA

67. Transaksi pendapatan-LRA, belanja, dan pembiayaan dalam bentuk barang dan jasa harus dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan cara menaksir nilai barang dan jasa tersebut pada tanggal transaksi. Di samping itu, transaksi semacam ini juga harus diungkapkan sedemikian rupa pada Catatan atas Laporan Keuangan sehingga dapat memberikan semua informasi yang relevan mengenai bentuk dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang diterima. Contoh transaksi berwujud barang dan jasa adalah hibah dalam wujud barang, barang rampasan, dan jasa konsultasi.

TANGGAL EFEKTIF

68. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan ini berlaku efektif untuk laporan keuangan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran mulai Tahun Anggaran 2009.